



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2002-2007

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DKI JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2002

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2002-2007

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Maksud dan Tujuan	1
	Landasan, Kedudukan dan Fungsi	2
	Sistematika Penyusunan	2
BAB II	KONDISI UMUM	4
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA	6
	A. Visi	6
	B. Misi	6
BAB IV	POLA KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS DAN POLA PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN	8
	A. Pola Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta, 2002-2007	8
	B. Sasaran Strategis	8
	C. Pola Pengembangan Program Pembangunan	10
BAB V	PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus bagian dari proses perubahan melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan di Propinsi DKI Jakarta harus pula menyentuh semangat reformasi yang terus bergulir diberbagai bidang kehidupan politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya. Kedudukannya sebagai ibukota negara menempatkan Jakarta menjadi barometer bagi perkembangan berbagai aspek pembangunan secara nasional.

Sebagai langkah awal bagi terselenggaranya proses pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang lebih terarah, maka diperlukan suatu pola dasar pembangunan yang selanjutnya disebut sebagai Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta 2002-2007. Pola dasar ini dimaksudkan tidak saja sebagai pijakan dasar bagi arah pembangunan Propinsi DKI Jakarta ke depan tetapi juga sebagai landasan filosofis bagi upaya percepatan pembangunan Jakarta.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta lebih lanjut menjadi landasan bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) serta RAPBD. Dengan demikian pola kebijakan, sasaran strategis serta pola pengembangan program pembangunan yang dituangkan dalam pola dasar ini menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Propinsi DKI Jakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 disusun dan ditetapkan dengan maksud agar penyelenggara pemerintahan di daerah dan masyarakat secara luas mempunyai arah yang tepat dan jelas dalam menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan tujuannya adalah agar

terbentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

C. LANDASAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta disusun dengan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional GBHN 1999-2004, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No. 050/829/II/Bangda, tanggal 28 April 2000, tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan perencanaan induk pembangunan daerah yang bersifat dokumen politis dan berisi visi dan misi daerah, serta tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu penyusunan pola dasar pembangunan daerah didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya pola dasar ini berfungsi sebagai kerangka dasar, arah serta pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Propinsi DKI Jakarta.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta disusun dengan mengikuti sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan, Kedudukan dan Fungsi
 - D. Sistematika Penyusunan
- II. Kondisi Umum
- III. Visi dan Misi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta
 - A. Visi
 - B. Misi

- IV. Pola Kebijakan, Sasaran Strategis dan Pola Pengembangan Program Pembangunan
 - A. Pola Kebijakan
 - B. Sasaran Strategis
 - C. Pola Pengembangan Program Pembangunan
- V. Penutup

BAB II

KONDISI UMUM

Jakarta sebagai ibukota negara tidak akan terlepas dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara. Dalam banyak hal persoalan-persoalan berskala nasional langsung mengimbas pada kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik kehidupan sosial dan ekonomi maupun kehidupan politik. Kedudukannya sebagai pusat bisnis dan perdagangan menempatkan Jakarta sebagai barometer dinamika kehidupan masyarakat dan stabilitas kawasan.

Dibidang hukum, walaupun terdapat perbaikan materi produk hukum, serta pembinaan aparatur, sarana dan prasarana penegakan hukum, namun dipihak lain penegakan supremasi hukum belum sejalan dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum daerah, perbaikan kesadaran hukum masyarakat, serta kepastian dan keadilan hukum. Dilain pihak, tekad untuk memenuhi tuntutan reformasi seperti pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan belum sepenuhnya diikuti langkah nyata dan kesungguhan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam implementasinya.

Upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah masih memperlihatkan hasil yang belum memadai. Disatu pihak, dunia usaha masih menghadapi persoalan sehubungan dengan krisis ekonomi berkepanjangan, dilain pihak pemerintah daerah masih harus mencari terobosan-terobosan baru guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri. Perbaikan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pemulihan perekonomian daerah masih berjalan lambat karena keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk itu diperlukan kebijakan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dan efektif serta berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik agar setiap pengeluaran dimaksud dapat memberikan stimulus yang lebih besar dalam peningkatan pelayanan masyarakat, pemulihan ekonomi serta rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana kota.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia masih belum tertangani secara luas dan intensif meskipun Jakarta sendiri harus menghadapi persaingan global yang membutuhkan sumber daya yang lebih baik. Disamping itu meluasnya pengangguran, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat secara langsung dapat mengganggu pula percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dibidang pendidikan masih dirasakan kurang bermaknanya pendidikan bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang mengakibatkan hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki pendidikan. Pendidikan belum diarahkan mampu membentuk akhlak, moralitas dan kehidupan agama yang lebih baik yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Padahal ini diperlukan dalam rangka menciptakan masyarakat yang memiliki kepekaan yang tinggi untuk membangun toleransi dan kebersamaan dalam masyarakat yang majemuk.

Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta telah mengalami dampak migrasi penduduk masuk yang sebagian besar relatif rendah kualitasnya, kurang berpendidikan dan tidak terampil. Sedangkan mereka yang keluar adalah yang relatif mapan dan berkualitas. Di lain pihak, belum tertibnya administrasi kependudukan menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi kependudukan yang teratur dan terkini.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jakarta diakui mengalami kemajuan dan perubahan yang pesat, namun demikian hasil pembangunan masih menyisakan perbedaan yang cukup tajam antara mereka yang berhasil dan yang belum berhasil. Kerawanan sosial apabila tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu keamanan dan ketentraman warga kota. Hal ini berpotensi menciptakan konflik sosial dan ketidakpuasan masyarakat yang akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Kondisi di atas diperburuk oleh adanya krisis ekonomi berkepanjangan sejak tahun 1997 yang diikuti oleh tuntutan perubahan yang mendasar dalam kehidupan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Dinamika perubahan sosial politik yang terjadi di DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir harus menjadi proses pembelajaran bagi segenap elemen masyarakat, utamanya dalam kehidupan berdemokrasi dan menjalankan reformasi. Tuntutan terbentuknya masyarakat madani dan tata pemerintahan yang baik menjadi prasyarat bagi berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Tata pemerintahan yang baik diterjemahkan sebagai suatu pola pengelolaan yang partisipatif, yang melibatkan peran swasta dan masyarakat secara lebih luas. Disamping itu, implementasi otonomi daerah telah mengilhami pula pergeseran pola perencanaan pembangunan yang sebelumnya bernuansa *top-down* dan sentralistik kepada proses yang lebih *bottom-up* dan desentralistik. Dengan demikian, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta ini menjadi langkah awal bagi berlangsungnya proses perencanaan yang lebih partisipatif, *bottom-up* dan desentralistik, sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA

Guna menyamakan persepsi tentang pola kebijakan dan arahan program yang tertuang dalam pola dasar, perlu diketengahkan visi dan misi Propinsi DKI Jakarta. Dengan makin memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah maupun warga Jakarta untuk bersama membangun kotanya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

A. VISI

“Terwujudnya Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jakarta sebagai ibukota negara dan kota perdagangan dan jasa hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.
- b. Jakarta hendaknya dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya.
- c. Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

B. MISI

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau.
2. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota.

4. Menegakan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota.
5. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik.

Pemahaman terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif.
- b. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya.
- c. Kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis.
- d. Menegakan supremasi hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif.
- e. Pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparatur yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi, serta didukung sistim informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB IV

POLA KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS DAN POLA PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN

A. POLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA, 2002-2007

Pada dasarnya kebijakan pembangunan Jakarta mengacu pada realitas komunitas, potensi ekonomi dan daya dukung lingkungan, serta nilai-nilai sosial budaya, sehingga mampu membuka ruang bagi partisipasi publik dalam menentukan masa depan Jakarta. Di sisi lain, kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara, pusat bisnis dan perdagangan dalam skala nasional dan internasional, menjadikan arah perkembangan Jakarta ditentukan bukan hanya oleh daerah, tetapi juga oleh pemerintah pusat. Pola kebijakan pembangunan Jakarta dirumuskan sebagai berikut:

1. Memulihkan dan mengembangkan perekonomian melalui pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat kota.
2. Meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan dan kesehatan serta daya jangkauannya ke segenap warga kota melalui keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan mutu kehidupan dan kerukunan warga kota melalui penciptaan interaksi dan komunikasi yang intensif di antara warga kota.
3. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana kota yang ramah lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Menegakkan supremasi hukum dan menjamin terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban kota melalui pelibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan pemerintahan kota secara bertahap dan berkelanjutan dengan membuka ruang bagi partisipasi publik.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Propinsi DKI Jakarta ke depan. Strategi pembangunan disusun berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal daerah sehingga diharapkan mampu mendorong perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Karena itu, strategi yang tepat dalam membangun Kota Jakarta

menjadi sangat penting dan menentukan. Dalam kaitan ini, digunakan 2 (dua) pendekatan implementasi pembangunan Kota Jakarta, yaitu :

1. Pendekatan partisipatif : Mewujudkan masyarakat kota yang mandiri dan sejahtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat.
2. Pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang kota yang strategis sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah/kawasan, secara berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kedua pendekatan tersebut diimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pola Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 serta kedua pendekatan strategi di atas, dirumuskan sasaran strategis sebagai target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun sasaran strategis tersebut adalah :

1. Pulihnya dan berkembangnya perekonomian kota dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
2. Meningkatnya mutu pengelolaan, aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga kota.
3. Meningkatnya kesadaran hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban kota melalui partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat.
4. Meningkatnya interaksi, komunikasi dan kelembagaan warga kota untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, berakhlak, berbudaya dan partisipatif.
5. Terbangun dan terpeliharanya sarana-prasarana kota untuk menunjang peran dan fungsi Jakarta sebagai kota jasa yang efektif dan efisien.
6. Tertata dan terkendalinya pertumbuhan dan perkembangan kota yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
7. Meningkatnya profesionalisme dalam pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik dan membuka ruang bagi partisipasi publik.
8. Meningkatnya jasa pelayanan perkotaan yang adil, merata dan terjangkau.
9. Meningkatnya pengendalian dan tertib administrasi kependudukan.
10. Tertatanya peraturan dan perundang-undangan daerah sesuai dengan tuntutan otonomi daerah dan dinamika masyarakat.

C. POLA PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Untuk arahan penetapan program pembangunan dan kegiatan, perlu dirumuskan pola pengembangan program sesuai dengan Pola Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

1. Kebijakan pemulihan dan pengembangan perekonomian dalam rangka pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat kota dilakukan melalui pembangunan sarana prasarana perekonomian daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui regulasi, pembinaan, perlindungan dan kemudahan akses bagi UKM-Koperasi dan sektor informal, penguatan jaringan dan transparansi distribusi serta ketahanan pangan, peningkatan partisipasi sektor swasta dan kerjasama dengan daerah sekitar wilayah berbatasan, pengembangan ketenagakerjaan dan penanganan masalah kemiskinan. Sementara itu program yang dapat dikembangkan melalui penguatan kemitraan antara lain penataan kawasan strategis yang menunjang pengembangan ekonomi kota dan upaya pembahasan yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk pengintegrasian kewenangan pengelolaan kawasan khusus Senayan, Kemayoran, pelabuhan dan jalan tol.
2. Kebijakan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dan kesehatan serta daya jangkauannya ke segenap warga kota melalui keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dilakukan melalui peningkatan mutu kehidupan dan kerukunan warga kota, penciptaan interaksi dan komunikasi yang intensif di antara warga kota. Peningkatan kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan ditekankan pada pendidikan kejuruan, peningkatan kualitas dan keterjangkauan. Pada sisi lain, peningkatan pelayanan kesehatan, kehidupan beragama, sosial budaya, penanggulangan bahaya narkoba, serta penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan.
3. Kebijakan penegakan supremasi hukum, peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota termasuk pengamanan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2004, dilakukan melalui pelibatan masyarakat secara aktif, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan kelembagaan daerah.
4. Kebijakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kota yang ramah lingkungan dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Peningkatan kebersihan kota dan penanganan sampah melalui perbaikan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pada sisi lain peningkatan kemampuan pengendalian banjir, pembangunan rusun, penataan

pemukiman kumuh dan penataan ruang yang lebih partisipatif harus menjadi perhatian. Selain itu peningkatan keindahan dan pencahayaan kota, penataan taman kota, hutan kota dan ruang terbuka hijau, perlu makin dikembangkan melalui program kemitraan. Kualitas lingkungan hidup seperti program kali bersih, pengelolaan air limbah dan program udara bersih harus makin ditingkatkan. Pembangunan sistem transportasi massal sesuai dengan kedudukan kota Jakarta sebagai ibukota negara dengan tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi harus diwujudkan.

5. Kebijakan peningkatan mutu pengelolaan pemerintahan kota harus ditingkatkan secara terus menerus, dengan memberikan ruang bagi partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas yang makin tinggi serta pembinaan aparatur bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu penataan peraturan perundang-undangan sesuai dengan otonomi daerah dan dinamika masyarakat harus makin dilengkapi. Pendelegasian kewenangan manajemen dan penguatan lini lapangan dalam aspek keamanan, ketertiban umum, pengendalian pedagang kaki lima, hunian ilegal, pelayanan masyarakat, pemeliharaan pertamanan dan sarana prasarana kota harus ditingkatkan. Peningkatan pendapatan asli daerah agar terus dipacu dan dana perimbangan perlu dioptimalkan. Peningkatan pengendalian dan tertib administrasi kependudukan merupakan hal yang penting untuk pengendalian urbanisasi termasuk pengetatan persyaratan memperoleh KTP dan penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran administrasi kependudukan.

BAB V

PENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 merupakan arah dan pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan ke depan dalam perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan pembangunan.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan dan aktualisasi dari prinsip-prinsip pemikiran yang dituangkan dalam pola dasar ini akan ditentukan oleh kondisi riil dan kenyataan objektif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Propinsi DKI Jakarta. Disamping itu, kemampuan, kesiapan, profesionalisme dan sikap mental aparaturnya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dituangkan dalam pola dasar ini.